

Analisis Biaya Transaksi pada Siklus Usahatani Jagung di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dodo Kurniawan

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapis Dompu
Email: dodokurniawan1987@gmail.com

Abstract

The characteristics of imperfect markets are characterized by the presence of transaction costs. One sector that is an imperfect market is the agricultural sector. Transaction costs in hybrid corn farming will affect the high and low profits of hybrid corn farming. The purpose of this study was to analyze the structure of transaction costs and the implications of transaction costs on the benefits of hybrid corn farming. The research method uses transaction cost analysis. The research was conducted in Dompu Regency, West Nusa Tenggara with 120 respondents as corn farmers. The results showed that there were six cycles in corn farming in Dompu Regency. The six cycles are; (1) pre-planting cycle; (2) cropping cycle; (3) maintenance cycle; (4) supervision; (5) harvest cycle; and (6) postharvest cycle. Of the six cycles, the postharvest cycle is the cycle that has the highest percentage of transaction costs of 23.17%, then the maintenance cycle is 18.53%, the harvest cycle is 17.65%, the planting cycle is 17.28% and the control cycle is 13.99%.

Keywords: *Transaction Costs, Corn Farming, Agricultural, and Dompu regency*

Abstrak

Karakteristik pasar tidak sempurna ditandai dengan adanya biaya transaksi. Salah satu sektor yang merupakan pasar tidak sempurna adalah sektor pertanian. Biaya transaksi pada usahatani jagung hibrida akan mempengaruhi tinggi rendahnya keuntungan usahatani jagung hibrida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur biaya transaksi dan implikasi biaya transaksi terhadap manfaat usahatani jagung hibrida. Metode penelitian menggunakan analisis biaya transaksi dan regresi linier berganda. Penelitian dilakukan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dengan 120 responden sebagai petani jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam siklus pada usahatani jagung di Kabupaten Dompu. Adapun enam siklus tersebut yakni; (1) siklus pratanam; (2) siklus tanam; (3) siklus pemeliharaan; (4) pengawasan; (5) siklus panen; dan (6) siklus pascapanen. Dari enam siklus tersebut siklus pascapanen merupakan siklus yang memiliki persentase tertinggi sebesar 23,17%, kemudian siklus pemeliharaan sebesar 18,53%, siklus panen sebesar 17,65%, siklus tanam sebesar 17,28% dan siklus pengawasan sebesar 13,99%.

Kata Kunci: *Biaya Transaksi, Usahatani Jagung, Pertanian, dan Kabupaten Dompu*

PENDAHULUAN

Permintaan jagung terus meningkat sejalan dengan berkembangnya industri pangan dan pakan ternak. Industri pakan dan pangan menggunakan jagung sebagai bahan baku utamanya, (Rudi, H. Peru & Trias, 2017). Selain prospek pasar yang cerah, ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan jagung di kabupaten Dompu sangat luas yang terdiri dari lahan marginal, tegalan, tadah hujan dan lahan bekas perladangan, selain itu didukung juga oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah yakni petani, buruh tani dan lainnya (Bambang, 2017).

Jika potensi produksi jagung terus dikembangkan, diperlukan enam syarat mutlak dan satu syarat pelancar agar pengembangan produksi jagung dapat berkelanjutan, yakni; (1) adanya pasar yang memadai, (2) adanya teknologi, (3), tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, (4) adanya perangsang (insentif) produksi bagi petani dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Serta adanya kredit produksi (sebagai faktor pelancar) (Mosher dalam Arsyad, 2010).

Terbatasnya ketersediaan dan akses pasar, teknologi, bahan/ alat produksi, dan perangsang (insentif) produksi, serta jasa pengangkutan dan kredit produksi akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi. Biaya transaksi yang tinggi dalam mengakses saluran pasar input maupun saluran pasar output tersebut menjadi masalah mendasar bagi petani di kabupaten Dompu sehingga berdampak pada minimnya keuntungan yang diperoleh petani. Turunnya harga secara drastis ini sering tidak sekedar mencerminkan adanya lonjakan penawaran yang tidak disertai dengan naiknya permintaan dengan proporsi yang seimbang, tetapi menggambarkan juga subsistem hilir yang tidak terbangun dengan baik (Yustika & Rukavina, 2015).

Fakta di atas bukanlah hal yang baru, menurut Tefera (2016), banyak studi empiris di pasar pertanian telah menunjukkan bahwa biaya transaksi yang tinggi merupakan kendala serius pada partisipasi petani kecil dalam pasar. Hasil penelitian (Sultan & Rachmina, 2016) menunjukkan bahwa struktur komponen biaya transaksi terjadi pada biaya negosiasi (60,30%), biaya informasi (14,07%), biaya koordinasi (12,22%), biaya pelaksanaan (8,03%), biaya monitoring (4,23%) dan biaya resiko 1,15%). Biaya transaksi ini muncul dikarenakan kurangnya informasi pasar, posisi tawar yang lemah dan mudah rusaknya banyak produk pertanian (Abebe, Bijman, & Royer, 2016).

Hasil penelitian (Montalbano, P., Pietrelli, & Salvatici, 2018) menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam saluran pasar yang tepat berpengaruh positif kepada peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan petani. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Mmbando et al., 2017) menunjukkan bahwa partisipasi petani dengan pedagang di pasar terdekat dan pedagang besar di kota-kota terdekat memiliki efek positif pada pengeluaran konsumsi per kapita dibandingkan dengan perantara di lahan pertanian. Selain meningkatkan partisipasi petani pada saluran pasar terdekat yang tepat, mengembangkan saluran pasar baru dapat meminimalisir biaya transaksi dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan yang lebih tinggi bagi para petani, (Voors & Haese, 2010).

Tingginya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usahatani jagung karena adanya biaya transaksi akan mengakibatkan perbedaan harga yang diterima oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen, (Sultan & Rachmina, 2016). Selain itu biaya transaksi dapat menyebabkan pendapatan yang diterima petani berbeda untuk petani yang mempunyai lahan dan tanpa lahan, area perdesaan dan perkotaan serta pria dan wanita (Leonardo & Robert, 1997). Pendekatan ekonomi biaya transaksi membuka ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi biaya transaksi, (Dwiastuti, 2017). Biaya transaksi merupakan masalah besar bagi petani, (Mishkin, 2008). Keberadaan biaya transaksi akan meningkatkan total biaya yang akan dikeluarkan dalam usahatani jagung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya transaksi pada siklus usahatani jagung di kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam literatur ekonomi kelembagaan memberikan definisi yang beragam tentang biaya transaksi, sebagian besar mendasarkan pada definisi-definisi yang sesuai dengan konseptualisasi teoritis dan atau yang relevan dengan kasus empirisnya. Menurut Coase biaya transaksi adalah "biaya mengorganisasi transaksi", sedangkan menurut Williamson (1989), biaya transaksi merupakan "ongkos untuk menjalankan sistem ekonomi (*the costs of running the economic system*) dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan", selanjutnya menurut North (1990), biaya transaksi merupakan biaya untuk menspesifikasi dan memaksakan (*enforcing*) kontrak yang mendasari pertukaran.

Sementara itu, menurut Mburu (2002), biaya transaksi dapat juga diartikan sebagai (1) biaya pencarian informasi dan biaya atas informasi; (2) biaya negosiasi dan pembuatan keputusan; dan (3) biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan (compliance). Singkatnya "biaya transaksi adalah ongkos negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (exchange)" (Yustika, 2012).

Namun, North (1990) memberikan batasan: "Biaya yang timbul untuk mendefinisikan barang dan jasa serta untuk memaksakan pertukaran"; menurut Furubon & Richter (1997), "Biaya transaksi adalah biaya untuk menciptakan, memanfaatkan, mengubah, dan

mempertahankan kelembagaan". Sedangkan menurut Benham & Benham (2000), "biaya transaksi adalah biaya yang timbul ketika individu melakukan pertukaran kepemilikan terhadap aset ekonomi dan mempertahankan hak eksklusif". Sedangkan menurut Milgrom & Roberts, mengatakan biaya transaksi mencakup semua kerugian yang timbulkan oleh keputusan-keputusan, rencana-rencana, pengaturan-pengaturan, atau persetujuan-persetujuan yang tidak efisien.

Menurut Coase (1992) biaya transaksi dikenal sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi, kontrak yang harus dibuat, inspeksi yang harus dibuat sendiri, pengaturan yang harus dibuat sendiri untuk menyelesaikan perselisihan, dan seterusnya. Jika biaya untuk melakukan pertukaran lebih besar daripada keuntungan yang akan dihasilkan oleh pertukaran itu, pertukaran itu tidak akan terjadi dan produksi yang lebih besar yang akan mengalir dari spesialisasi tidak akan terwujud. Dengan cara ini, biaya transaksi tidak hanya mempengaruhi pengaturan kontrak, tetapi juga barang dan jasa apa yang dihasilkan.

Selain itu, biaya transaksi dapat dikategorikan dalam tiga jenis, Pertama, Market transaction costs adalah biaya untuk menggunakan pasar (Furubotn and Richter, 1999). Biaya transaksi sepanjang saluran pasar dari tingkat petani (Collinson et al., 2002). biaya yang timbul ketika individu melakukan pertukaran kepemilikan terhadap aset ekonomi dan mempertahankan hak eksklusifnya (Benham & Benham, 2001). Kedua, Managerial transaction costs adalah biaya untuk menciptakan keteraturan berupa: biaya operasional, public relation, biaya informasi (Furubotn and Richter, 1999). Dan Ketiga, Political transaction costs merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan, berupa tata aturan seperti peraturan pemerintah, administrasi hukum. Biaya politik, termasuk yang berkaitan dengan struktur pengelolaan kegiatan ekonomi antara lain birokrasi publik (Furubotn and Richter, 1999).

Kelembagaan menentukan transaksi, sekaligus menata agen ekonomi untuk mewujudkan control bersama terhadap transaksi. Kelembagaan yang efisien dapat menurunkan biaya transaksi secara signifikan. Hal ini hanya bisa dicapai dengan menciptakan aturan main yang disepakati bersama oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam dunia bisnis, (Yustika, 2012).

Jika semua orang dalam masyarakat memiliki informasi yang sempurna, rasional seratus persen dan berperilaku jujur dan tidak oportunistik, pertukaran melalui mekanisme pasar adalah metode yang paling efisien. Persoalannya, dalam dunia nyata informasi yang dimiliki aktor-aktor ekonomi jauh dari sempurna, tidak semua orang rasional seratus persen, dan tidak banyak pula orang yang jujur melainkan lebih banyak yang oportunistik dan curang.

Informasi bukan hanya tak sempurna, bahkan sering bersifat asimetris di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, informasi yang tidak sempurna dan asimetri dapat mengarahkan pengambil keputusan yang berjiwa oportunistik dan curang pada adverse selection dan moral hazards. Lebih jauh orang memiliki informasi dapat mengeksploitasi pemilikan atas informasi tersebut untuk mengejar kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompok.

Biaya transaksi dapat menyebabkan pendapatan yang diterima petani berbeda untuk petani yang mempunyai lahan dan tanpa lahan, area pedesaan dan perkotaan serta pria dan wanita (Leonardo & Robert, 1997). Keberadaan ekonomi kelembagaan sebagai upaya menekan biaya transaksi sehingga perekonomian berjalan seefisien mungkin, (Supratikno, 2010). Bila dalam pandangan neoklasik menganggap harga sebagai instrument untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) yang tercapai melalui mekanisme pasar, maka dalam pandangan ekonomi kelembagaan kewenangan (authority) dan norma social juga menjaga keseimbangan dalam mekanisme non pasar.

North (1990), mengatakan model pasar persaingan sempurna selalu berasumsi bahwa untuk mencari, mendapatkan dan mengolah informasi dan melakukan transaksi tidak mengeluarkan biaya, merupakan asumsi yang keliru. Justru North menyaksikan sendiri bahwa dalam setiap pertukaran ada biaya transaksi yang dikeluarkan. Biaya transaksi ini akibat adanya informasi yang tidak sempurna. Lebih lanjut North mengatakan bahwa biaya mencari, memperoleh dan mengelola informasi merupakan kunci dari biaya transaksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan karena daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi jagung di NTB. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada 120 petani responden dengan menggunakan kuesioner. Penentuan responden dilakukan dengan metode *stratified proposional sampling* dengan pembagian proporsi yang berbeda untuk setiap kecamatan. Metode analisis data menggunakan *transaction cost analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 120 petani responden terdapat komponen biaya transaksi yang paling tinggi adalah biaya pelaksanaan yaitu sebesar Rp.1.525.000 (43,35%), kemudian disusul biaya transaksi pengawasan yaitu sebesar Rp.998.000 (28,37%) dan biaya transaksi transportasi yaitu sebesar Rp.725.000 (20,61%). Sedangkan biaya transaksi koordinasi merupakan biaya transaksi yang paling kecil yaitu sebesar Rp.20.000 (0,57%).

Tabel 1. Rata-rata Biaya Transaksi pada usahatani jagung per hektar

Komponen Biaya Transaksi	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Biaya Informasi	120.000	3,41
Biaya Negosiasi	130.000	3,70
Biaya Koordinasi	20.000	0,57
Biaya Transportasi	725.000	20,61
Biaya Pelaksanaan	1.525.000	43,35
Biaya Pengawasan	998.000	28,37
Total	3.518.000	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan siklus usahatani, biaya transaksi yang paling tinggi yaitu pada siklus pasca panen yaitu sebesar Rp.815.000 (23,17%), kemudian disusul siklus pemeliharaan yaitu sebesar Rp.625.000 (18%) dan selanjutnya siklus panen dan pra tanam dengan masing-masing yaitu sebesar Rp. 612.000 (17,65%) dan Rp.608.000 (17,28), sedangkan siklus tanam berada pada siklus yang paling kecil mengeluarkan biaya transaksi yaitu sebesar Rp.330.000 (9,38%).

Dilihat dari struktur siklus yang paling tinggi adalah siklus pasca panen yakni sebanyak 23,17 persen dari total keseluruhan biaya transaksi dalam usahatani jagung, hal ini beralasan dimana pada siklus ini terdapat banyak aktifitas yang dilakukan oleh petani pada siklus ini yakni pengumpulan hasil panen, pemipilan, pengeringan dan penjualan. Itulah mengapa siklus ini menjadi siklus yang banyak mengeluarkan biaya transaksi.

Tabel 2. Rata-rata Biaya Transaksi pada usahatani jagung per siklus usahatani

Biaya Transaksi Per Siklus	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pra Tanam	608.000	17,28
Tanam	330.000	9,38
Pemeliharaan	625.000	18,53
Pengawasan	492.000	13,99
Panen	621.000	17,65
Pasca Panen	815.000	23,17
Total	3.518.000	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Siklus yang memiliki biaya transaksi yang paling kecil adalah siklus tanam yakni sebanyak 9,38 persen saja. Hal ini mengingat aktifitas penanaman hanya satu kegiatan saja

yakni penanaman saja. Sedangkan siklus pra tanam, pemeliharaan, pengawasan dan panen berada ditas 10 persen dari total keseluruhan biaya transaksi dalam usahatani jagung.

Pembahasan

Besar kecilnya biaya transaksi sangat tergantung daripada efisiensi atau tidaknya model kelambagaan ekonomi yang ada. Terutama model kelembagaan ekonomi dalam bentuk aturan main yang diciptakan dalam Aspek kontrak (Menard, 2000), Modal sosial (Narayan, 1999), struktur tata kelola (Williamson, 1998), atribut transaksi (Milgron & Robert, 1992), prosedur penegakan (Yeager, 1999), perilaku para pelaku (Furubotn and Richter, 1999), dan insentif (Turvani, 1996). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih luas dan komprehensif komponen biaya transaksi dalam usahatani jagung.

Masing-masing komponen biaya transaksi ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Biaya informasi, negosiasi dan pelaksanaan sesuai dengan penelitian (Angraini, 2005), biaya pengawasan berdasarkan penelitian Sukmadinata, (1995) dalam (Sultan & Rachmina, 2016), biaya koordinasi berdasarkan penelitian Rudiyanto (2011) dalam (Sultan & Rachmina, 2016) dan Transportasi berdasarkan penelitian (Budiman, 2014).

Hasil penelitian telah menemukan komponen biaya transaksi dalam usahatani jagung yaitu komponen biaya transaksi pada biaya informasi, biaya negosiasi, biaya koordinasi, biaya transportasi, biaya pelaksanaan dan biaya pengawasan dan dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis biaya transaksi yaitu pertama, market transaction cost yang terdiri biaya perantara beli benih, fee kontrak penjualan, biaya perantara pengurusan pembiayaan, dan biaya selisih harga jual. Kedua, managerial transaction cost teridentifikasi biaya angkut tenaga kerja, angkut pupuk, angkut hasil panen, biaya transportasi ke lembaga pembiayaan, biaya makan dan minum selama usahatani. Ketiga, political transaction cost teridentifikasi komponen biaya bunga kredit, biaya administrasi, biaya pajak pph, biaya pajak tanah, biaya NPWP, biaya dokumen dan biaya materai.

Pada lokasi penelitian struktur biaya transaksi terdiri dari biaya eksplisit dan biaya insplisit sesuai dengan Penelitian Williamson (1981) menemukan biaya eksplisit atau juga dikenal biaya informal gift exchange dan biaya implisit atau juga dikenal biaya emotional interction. Kedua komponen biaya transaksi ini terbagi menjadi biaya informasi, negosiasi, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan transportasi. Keseluruhan biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan petani responden mulai dari pengadaan pembiayaan, persiapan lahan (pratanam) sampai pada saat penjualan jagung (pasca panen).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen biaya transaksi pada usahatani jagung hibrida di Kabupaten Dompu terdiri dari (1) biaya pelaksanaan; (2) biaya pengawasan; (3) biaya transportasi; (4) biaya negosiasi; (5) biaya biaya informasi; dan (6) biaya koordinasi. Biaya pelaksanaan merupakan komponen biaya transaksi yang memiliki persentase paling tinggi yakni 43,35%, selanjutnya biaya pengawasan 28,37%, biaya transportasi 20,61%, biaya negosiasi 3,70%, biaya informasi 3,41% dan biaya koordinasi 0,57%. Komponen-komponen biaya transaksi ini terdistribusi pada setiap siklus usahatani jagung hibrida diantaranya; (1) siklus pratanam; (2) siklus tanam; (3) siklus pemeliharaan; (4) pengawasan; (5) siklus panen; dan (6) siklus pascapanen. Siklus pascapanen merupakan siklus yang memiliki persentase tertinggi yakni 23,17%, selanjutnya siklus pemeliharaan 18,53%, siklus panen 17,65%, siklus pratanam 17,28% dan siklus pengawasan 13,99%. Biaya transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usahatani jagung hibrida.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, E. (2005). *Analisis Biaya Transaksi dan Penerimaan Nelayan dan Petani di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi*. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/8047>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Bambang. (2017). *Agribisnis Jagung Sebagai Lokomotif Penanggulangan Kemiskinan di*

Kabupaten Dompu. Dompu.

- Benham, A., & Benham, L. (2001). The Costs of Exchange. *Ronald Coase Institute Working Papers*, 1. Retrieved from <http://www.coase.org/workingpapers/wp-1.pdf>
- Budiman. (2014). *Analisis komparatif biaya transaksi petani rumput laut dalam kontrak lembaga keuangan formal-informal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan*. Universitas Brawijaya.
- Coase, R. H. (1992). The Institutional Structure of Production. *The American Economic Review*, 82(4), 713–719. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69305-5_3
- Collinson, C., Kleih, U., Burnett, D., Muganga, A., Jagwe, J., & Ferris, R. S. B. (2002). Transaction cost analysis for selected crops with export potential in Uganda. *ASARECA/IITA Monograph*, (October).
- Dwiastuti, R. (2017). *Metodologi Penelitian “ Sosial Ekonomi Pertanian” : Dilengkapi Pengenalan berbagai Perspektif Pendekatan Metode Penelitian*. Malang: UB Press.
- Furubotn and Richter. (1999). Agricultural Economics & Economics. *Agricultural Economics & Economics*, (1996), 149–152.
- Leonardo, A., & Robert, E. (1997). The Effect of Trnsaction Costs on Labor Market Participation and Earnings: Evidence From Rural Philippine Markets. *Econstor*.
- Mburu, J. and R. B. (2002). Wildlife Co-mangement in Kenya: An Empirical Analysis of Landowners’ Incentives for Participation. *Conference on International Agricultural Research for Development*, (Gurung 1995), 1995–1999.
- Menard, C. (2000). *Institutions, Contracts and Organizations “Perspectives from New Institutional Economics.”*
- Mishkin, S. F. (2008). *Buku Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan Buku 1* (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mmbando, F. E., Wale, E. Z., Baiyegunhi, L. J. S., Mmbando, F. E., Wale, E. Z., The, L. J. S. B., ... Baiyegunhi, L. J. S. (2017). Development in Practice The welfare impacts of market channel choice by smallholder farmers in Tanzania The welfare impacts of market channel choice by smallholder. *Development in Practice*, 27(7), 981–993. <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1353066>
- Montalbano, P., Pietrelli, R. &, Salvatici, L. (2018). Participation in the market chain and food security : The case of the Ugandan maize farmers. *Food Policy*, 76(March), 81–98. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.03.008>
- Narayan, D. (1999). *Bonds and Bridges : Social Capital And Poverty*.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. North, Douglass C.* <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606892.012>
- Rudi, H. Peru & Trias, Q. D. (2017). *Rudi, H. Peru & Trias, Qurnia Dewi. (2017). Panduan Praktis Budidaya Jagung, Jakarta, Penebar Swadaya.* (F. A. Nurrohman, Ed.). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sultan, H., & Rachmina, D. (2016). Pengaruh Biaya Transaksi terhadap Keuntungan Usahatani Kedelai Di Kabupaten Lamongan , Jawa Timur. *Forum Agribisnis*, 6(2), 161–178. Retrieved from <http://journal.ipb.ac.id/index.php/fagb/article/view/17242>
- Supratikno, H. (2010). *Ekonomi Nurani Vs Ekonomi Naluri.pdf*. (M. dan J. Am, Ed.) (Pertama). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Tefera, D. A. J. B. and M. A. S. (2016). Agricultural Co-Operatives In Ethiopia: Evolution, Functions and Impact. *Journal of International Development*, 96(1), 10–14. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Turvani, M. (1996). *The Core of the Firm: The Issue of the Employoyer-Employee Relationship*.
- Voors, M. J., & Haese, M. D. (2010). Smallholder dairy sheep production and market channel development: An institutional perspective of rural Former Yugoslav Republic of Macedonia. *Journal of Dairy Science*, 93(8), 3869–3879. <https://doi.org/10.3168/jds.2009-2685>
- Williamson, O. E. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach.

- American Journal of Sociology*, 87(3), 548–577. <https://doi.org/10.1086/227496>
- Williamson, O. E. (1989). Chapter 3 Transaction cost economics. *Handbook of Industrial Organization*, 1, 135–182. [https://doi.org/10.1016/S1573-448X\(89\)01006-X](https://doi.org/10.1016/S1573-448X(89)01006-X)
- Williamson, O. E. (1998). Transaction Cost Economics: How It Works; Where It is Headed. *De Economist*, 146(1), 23–58. <https://doi.org/10.1023/a:1003263908567>
- Yustika & Rukavina. (2015). *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua.
- Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan “Paradigma, Teori dan Kebijakan”*. (Novietha I. Sallama, Ed.). Jakarta: Erlangga.